

TINJAUAN SISTEM POLITIK KERAJAAN SAMUDERA PASAI: DINAMIKA DAN WARISAN SEJARAHNYA

Raihani Dewi Nasution^{1,*}, Sholahuddin Ashani^{2,*}

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia, ² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

¹ rai.hanie@gmail.com, ² sholahuddinashani@uinsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan tinjauan menyeluruh terhadap sistem politik Kerajaan Samudera Pasai, dengan fokus pada dinamika internalnya dan warisan sejarah yang masih memengaruhi konteks politik Indonesia saat ini. Diskusi mencakup sejarah pendiriannya dan sosok Malikussaleh, peran Kerajaan dalam penyebaran Islam, peran sebagai pusat perdagangan Nusantara dan internasional, serta keunikan sistem politik dan pemerintahannya yang mencampurkan elemen kerajaan dan ajaran Islam. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan keunikan dari sistem pemerintahan Kerajaan Samudera Pasai yang mendasari tata pemerintahan yang bercorak legitimasi ilahi, kepiawaian diplomatic, sistem pemerintahan Islam, dan musyawarah sebagai media penetapan kebijakan publik. Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai juga menegaskan pentingnya wawasan bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas politik dan dinamika sosial di masyarakat.

Kata Kunci: *Sistem Politik, Samudera Pasai, Kerajaan Nusantara, Sejarah*

Abstract

This article aims to provide a comprehensive overview of the political system of the Kingdom of Samudera Pasai, focusing on its internal dynamics and the historical legacy that still influences Indonesia's political context today. Discussions include the history of its founding and the figure of Malikussaleh, the sultanate's role in the spread of Islam, its role as an archipelago and international trade center, and the uniqueness of its political and governmental system that blended elements of kingship and Islamic teachings. The findings of this research show the uniqueness of the Samudera Pasai Sultanate's governance system, which was based on divine legitimacy, diplomatic expertise, Islamic governance system, and musyawarah as a medium for determining public policy. The glory of the Sultanate of Samudera Pasai also emphasizes the importance of insight for policy makers, academics, and the public in understanding the complexity of politics and social dynamics in society.

Keywords: *Political system, Samudera Pasai, Nusantara kingdom, History*

PENDAHULUAN

Kerajaan Samudera Pasai, salah satu kerajaan Islam awal di Indonesia, memiliki peran signifikan dalam sejarah maritim dan penyebaran Islam di Nusantara. Muncul sekitar tahun 1267 Masehi, Kerajaan ini strategis terletak di ujung utara Sumatra, menjadikannya pusat perdagangan maritim Samudera Hindia¹. Melalui rivalitasnya dengan Melaka, Samudera Pasai menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan regional dan internasional pada pusaran abad ke-14 dan ke-15.² Peran penting Kerajaan ini dalam penyebaran Islam juga tak terbantahkan, dengan tokoh seperti Sultan Malikussaleh dan Pangeran Samudera berkontribusi pada penyebaran agama di bumi Aceh³. Meskipun telah banyak penelitian tentang sejarah dan peran Kerajaan Samudera Pasai, masih ada kekosongan pengetahuan yang perlu diungkap dan disebarluaskan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai aspek penting tentang Kerajaan Samudera Pasai. Studi oleh Hamid menyoroti strategi perdagangan Kerajaan ini di Selat Malaka, Samudera Hindia, dan Laut Jawa.⁴ Sementara itu, Fitriani et al. meneliti peran Sultan Malikussaleh dalam perkembangan Kerajaan dari tahun 1297 hingga 1326 Masehi.⁵ Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Arifin, menyoroti bagaimana komunitas diaspora Muslim Pasai mempengaruhi perkembangan budaya di Pantai Utara Jawa.⁶ Meskipun telah ada banyak penelitian tentang sejarah Kerajaan Samudera Pasai, masih ada kekosongan pengetahuan yang perlu diisi, terutama dalam hal dinamika politik dan warisan sejarahnya.

Penelitian ini diilhami oleh keinginan untuk mengisi kesenjangan dengan mengungkap aspek-aspek politik yang belum terbuka sepenuhnya dari Kerajaan Samudera Pasai. Melalui analisis mendalam terhadap berbagai sumber sejarah dan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting tentang bagaimana politik Kerajaan ini

¹ Rinaldi Mirsa and others, 'Space Pattern of Samudera Pasai Sultanate', *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 1.2 (2021), 94–103 <<https://doi.org/10.52088/ijesty.v1i2.120>>.

² Kenneth R. Hall, 'Maritime Trade and Societal Transitions in the Western Indonesian Archipelago: Samudra-Pasai at the Dawn of the European Age (c. 1200-1500)', *Asian Review of World Histories*, 5.1 (2017), 31–69 <<https://doi.org/10.12773/arwh.2017.5.1.031>>.

³ Yogi Aji Pangestu, Debora Alfi Dwidhi Teofani, and Rabith Jihan Amaruli, 'Uncovering Javanese Islamic Asceticism to Prevent Destructive Tourism Patterns in Gunung Kemukus', *E3S Web of Conferences*, 317 (2021) <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701019>>.

⁴ Abd. Rahman Hamid, "Jalur Rempah dan Islamisasi Nusantara:," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 23, no. 3 (2022): 269–82, <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i3.1065>.

⁵ Andini Fitriani, Idrina Siregar, and Supian Ramli, 'Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326M', *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2.1 (2022), 11–22 <<https://doi.org/10.22437/jejak.v2i1.18539>>.

⁶ Arifin, Abd Rahman Hamid, and Siti Masykuroh, 'Pasai Muslim Diaspora in the 16th Century on the North Coast of Java', *KnE Social Sciences*, 2024 (2024), 158–70 <<https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15847>>.

berkembang dari masa ke masa dan bagaimana warisan politiknya masih berpengaruh dalam konteks sejarah dan budaya Indonesia modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang sejarah politik dan kajian Islam di Indonesia, serta menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut tentang Kerajaan Samudera Pasai.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmiah yang mencakup pendekatan literatur dan analisis historis. Melalui pendekatan literatur, peneliti melakukan identifikasi sumber dari berbagai buku sejarah, artikel ilmiah, dokumen historis, dan karya-karya akademik terkait Kerajaan Samudera Pasai. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan keandalan dan relevansinya dalam memahami dinamika politik dan sistem pemerintahan Pasai. Selanjutnya, peneliti melakukan review terhadap kepustakaan terkait Kerajaan Samudera Pasai secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sejarah pendirian kerajaan, peran Malikussaleh, pusat penyebaran Islam, serta hubungan perdagangan dan diplomasi Pasai dengan wilayah lain.

Analisis historis juga diterapkan dalam penelitian ini dengan melakukan penelusuran kronologis sejarah Kerajaan Samudera Pasai dari masa pendiriannya hingga kejatuhan kejayaannya. Fokus diberikan pada peristiwa-peristiwa penting, dan kebijakan politik yang dijalankan. Dengan mengidentifikasi pola-pola dalam dinamika politik dan sistem pemerintahan, peneliti dapat memberikan interpretasi yang mendalam tentang pengaruh Kerajaan Samudera Pasai dalam konteks sejarah Nusantara. Kesimpulan dari analisis historis ini diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas dinamika politik serta warisan sejarah yang dimiliki oleh Kerajaan Samudera Pasai, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerajaan Samudera Pasai

Cahaya sejarah yang bersinar cerah di Nusantara tidak mungkin dipisahkan dari jejak yang ditinggalkan oleh Kerajaan Samudera Pasai. Sebagai lambang keagungan dan kebijaksanaan, kerajaan ini terletak di sepanjang pantai yang memukau di Aceh, menandai bukan hanya sebagai pusat perdagangan yang strategis, tetapi juga sebagai penjaga dan pembawa cahaya dalam penyebaran ajaran Islam dan kekayaan budaya. Sejak berdirinya pada awal abad ke-13, yang dicatat dalam catatan sejarah oleh kebijaksanaan Sultan Malikussaleh, Kerajaan Samudera Pasai telah menjadi tonggak kemajuan yang tak tertandingi dalam peradaban. Di sini, rempah-rempah berharga dan pengetahuan luas bergabung dalam keharmonisan yang mempesona, menciptakan landasan bagi perkembangan yang monumental dan menginspirasi.

Namun, kebesaran Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya terletak pada kekayaan materialnya. Melalui jendela-jendela masjid-masjid yang megah dan madrasah-madrasah yang cemerlang, cahaya ilmu pengetahuan dan agama menyinari jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan. Jejak-jejak kearifan dan

peradaban tersembunyi di balik kemegahan arsitektur dan seni ukiran yang memukau. Kerajaan ini telah menciptakan fondasi bagi kemajuan dan kemakmuran yang tak terlupakan dalam alur sejarah Nusantara. Berikut sejarah Kerajaan Samudera Pasai sebagaimana diuraikan secara kronologis-historis.

Sultan Malikussaleh dan Pembentukan Kerajaan

Sebelum munculnya Kerajaan Samudera Pasai, seperti yang diuraikan oleh Oetomo dalam Ambo Asse Azis, ada kerajaan sebelumnya yang disebut *Rami*. *Rami* terkenal sebagai kerajaan pra-Islam di Aceh. Catatan perjalanan pelancong Arab abad ke-9 menyebutkan kerajaan pra-Islam di Aceh, seperti “*Rami*” atau “*Ramni*” dan “*Lamri*”. Nama *Lamuri* juga muncul dalam tulisan *Nagarakertagama* (1365 M) sebagai bagian dari Majapahit. Dalam catatan Cina, *Lamuri* disebut dengan variasi nama seperti *Lan-Li*, *Lan-wu-li*, *Nan-wu-li*, atau *Nanpo-li*, sedangkan Marco Polo menggunakan istilah *La(m)bri(n)*. *Lamuri* disebut sebagai kerajaan Islam besar sebelum Samudera Pasai, ditunjukkan oleh keberadaan benteng. Ini menunjukkan bahwa Aceh memiliki kerajaan sebelum Samudera Pasai.⁷

Pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Samudera Pasai di wilayah Aceh pada abad ke-13 merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Para sejarawan dan peneliti Eropa telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari dengan cermat asal usul kerajaan yang mempunyai pengaruh besar di Aceh ini. Penyelidikan historis secara menyeluruh menghasilkan afirmasi keberadaan Kerajaan Samudera ditenggarai berkisar abad ke-13. Temuan mereka sebagaimana dikutip oleh Rusdi et al. menunjukkan adanya konsensus bahwa Sultan Malikussaleh memegang peranan penting dalam terbentuknya kerajaan ini. Sultan dikenal sebagai tokoh sentral yang berperan penting dalam menata struktur kekuasaan dan membangun landasan politik dan ekonomi yang kuat.⁸ Berdasarkan penelitian mereka, diperkirakan berdirinya kerajaan Samudera Pasai dimulai sekitar tahun 1207 dan berakhir pada tahun 1524.⁹

Hikayat Raja-Raja Pasai dalam catatan Ajis menceritakan bahwa Meurah Silu (Malikussaleh) melihat semut raksasa dan menamai tempat itu “Samudra Pasai” karena kebesarannya. Selain itu, ada teori bahwa “Samudra” mungkin berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti laut, sementara “Pasai” mungkin berasal dari bahasa Persia, yang berarti pedagang Gujarat yang berdagang di daerah itu.¹⁰ Meurah Silu merupakan nama dari Sultan Malikussaleh sebelum dia menggantinya dengan nama Islam-nya. Malikussaleh adalah Sultan pertama Samudera Pasai, yang diislamkan oleh Syekh Ismail, seorang ulama dari

⁷ Ambo Asse Ajis, “Ramni—Ilamuridesam: Kerajaan Aceh Pra-Samudera Pasai,” *Berkala Arkeologi SANGKHALAKALA* 20, no. 2 (2018): 79.

⁸ Agus Budi Sufi, Rusdi, and Wibowo, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), p. 50.

⁹ J Iswanto, ‘Pertumbuhan Institusi Sosial Politik Samudera Pasai, Malaka, Banten Dan Mataram’, *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2.1 (2021), 38–49.

¹⁰ Fitriani, Siregar, and Ramli, p. 14.

Makkah. Syeikh Ismail memberinya nama Sultan Malikussaleh dan gelar *Zillullah fil Ardh* (bayangan Allah di bumi).¹¹

Sultan Malikussaleh telah meraih status legendaris dalam kisah-kisah rakyat Aceh dan dalam sejumlah hikayat yang masih hidup dalam budaya masyarakat Aceh hingga saat ini. Di mata masyarakat, dia dianggap sebagai permata yang tak pernah pudar, terus dihargai, dipuji, dan dihormati. Sebagai seorang penguasa, Malikussaleh memancarkan kepribadian yang menarik dan cerdas, sebuah citra yang tergambar dalam sebuah inskripsi yang terpahat di depan nisan makamnya. Inskripsi tersebut mencitrakan dia sebagai sosok yang patut dihormati, penuh dengan ketakwaan, dan bijaksana. Gelar “Sultan Malikussaleh” telah melekat padanya, menjadi simbol dari kebijaksanaan dan kemuliaan yang menginspirasi dan diperbincangkan bahkan hingga kini.¹²

Samudra Pasai sebagaimana dikutip dari Taqiyuddin, merupakan kerajaan Islam pertama di Aceh, merujuk pada wilayah pesisir di utara Aceh (Sumatera), yang menjadi pusat dinasti Islam dari abad ke-7 hingga ke-13 M, dan kembali dari abad ke-10 hingga ke-16 M. Dinasti ini kemudian dikenal sebagai Dinasti Ash-Shaliyyah, mengambil nama dari sultan pendirinya, Malikussaleh. Dalam dokumen dari abad ke-14 dan ke-16 M, wilayah ini disebut dengan berbagai nama seperti Sumuthrah, Syummathrah, dan Syummuthrah, yang menandai peran pentingnya sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan. Selama lebih dari dua abad, Samudra Pasai menjadi markas pemerintahan Dinasti ash-Shalihiyyah, sebuah periode yang ditandai oleh kemakmuran ekonomi dan perkembangan budaya. Pasai dipercayai sebagai nama daerah atau kerajaan lokal sebelum kedatangan Islam di kawasan tersebut, terletak di sepanjang aliran sungai Pasai (Krueng Pase) di Aceh. Penemuan catatan sejarah, seperti penyebutan Pasai dan Jambur Ayir dalam inskripsi sebuah nisan makam dari abad ke-15 M di Gampong Maddi, Nibong, Aceh Utara, memberikan bukti kuat akan keberadaan dan peran penting Pasai dalam sejarah regional.¹³

Dengan lokasinya yang strategis di pesisir utara Sumatera di bagian barat Selat Malaka, Samudera Pasai berfungsi sebagai pintu masuk ke Samudera Hindia. Lokasinya di jalur pelayaran utama yang menghubungkan India, Nusantara, dan Cina membuatnya pusat perdagangan penting.¹⁴ Samudera Pasai saat ini hanyalah sebuah gampong sekitar 15 km di sebelah timur Kota Lhokseumawe. Namun, Mirsa et al. menjelaskan bahwa sejarah telah mencatat daerah ini menjadi pusat Kerajaan yang berpengaruh selama sekitar tiga abad, dari abad ke-13 hingga awal abad ke-16 M. Sebagai pusat Kerajaan, Samudera Pasai memainkan peran penting dalam perdagangan regional dan penyebaran

¹¹ Budi Sulistiono, *Menelusuri Tinggalan Arkeologi Kesultanan Samudera Pasai* (Jakarta: Lembaga Pentashihan & Mushaf Alqur'an, 2015), p. 1.

¹² Fitriani, Siregar, and Ramli, “Peran Sultan Malikussaleh dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326M,” 17.

¹³ Taqiyuddin Muhammad, ‘Jejak Kebudayaan Persia Samudra Pasai’, *Media Syari'ah: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2017, 31–42.

¹⁴ Hamid, “Jalur Rempah dan Islamisasi Nusantara:,” 271.

Islam di Asia Tenggara, menunjukkan betapa strategisnya daerah ini untuk menghubungkan berbagai peradaban besar melalui jalur laut.¹⁵

Setelah kepemimpinan Sultan Malikussaleh, melansir dari catatan Pemerintah Aceh, terdapat silsilah raja-raja yang memerintah Kerajaan Samudera Pasai tercatat sebagai berikut:¹⁶ Rangkaian kepemimpinan dalam sejarah Kerajaan Samudera Pasai menandai perjalanan panjang dari zaman ke zaman. Dimulai dengan keberadaan Sultan Malikussaleh pada tahun 1267 hingga 1297 M, era awal ini menandai fondasi yang kokoh bagi Kerajaan tersebut. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malikuzzahir dari tahun 1297 hingga 1326 M, yang membawa era keemasan dan perkembangan yang signifikan. Periode berikutnya, di sekitar 1326 hingga sekitar 1345 M, disorot oleh kepemimpinan Sultan Malikuzzahir, yang menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Sultan Malikuzzahir menjadi sosok misterius dengan masa pemerintahan yang tidak jelas, menyisakan tanda tanya dalam sejarah.

Era berikutnya, dipimpin oleh Sultan Ahmad Malikuzzahir dari sekitar tahun 1346 hingga 1383 M, menandai periode ketegangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dilanjutkan oleh Sultan Zainul'abidin Malikuzzahir dari tahun 1383 hingga 1405 M, Kerajaan itu mengalami masa transisi dan perubahan penting dalam politik dan budaya. Sementara itu, Sultanah Nahrasiyah memberikan cahaya baru pada periode 1405 hingga 1412, menjadi sosok yang dikenang dalam sejarah Kerajaan. Era berikutnya, dipimpin oleh Sultan Salahuddin dari sekitar tahun 1402 hingga tidak pasti, menandai periode ketidakpastian dalam kepemimpinan.

Kerajaan kemudian diselimuti oleh ketidakjelasan saat Sultan Abu Zaid Malikuzzahir memerintah, meninggalkan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Sultan Mahmud Malikuzzahir, yang memerintah sekitar tahun 1455 hingga sekitar 1477 M, menghadapi tantangan dan perubahan yang besar dalam pemerintahannya. Era selanjutnya, dipimpin oleh Sultan Zainal'Abidin dari sekitar tahun 1477 hingga sekitar 1500, menandai periode kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sultan Abdullah Malikuzzahir, yang memerintah sekitar tahun 1501 hingga 1513, menjadi sosok yang dikenal dengan kebijaksanaan dan visi jauhnya. Akhirnya, era terakhir Kerajaan Samudera Pasai, dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin dari tahun 1513 hingga 1524, menandai akhir dari sebuah babak penting dalam sejarah Aceh yang penuh dengan perjuangan dan prestasi yang luar biasa.

Pusat Penyebaran Islam dan Perdagangan

Kerajaan Samudra Pasai dalam perjalanan sejarahnya telah memegang peran yang krusial dalam sejarah Islam di Nusantara dan Asia. Dikenal sebagai kerajaan Islam pertama dan paling berpengaruh di Aceh, Samudra Pasai tidak hanya menyebarkan agama Islam secara luas, tetapi juga menerapkan pemikiran Islam sebagai fondasi untuk membangun prinsip-prinsip peradaban Islam di wilayah tersebut. Dengan visi yang inovatif dan konstruktif, kerajaan

¹⁵ Mirsa and others, p. 95.

¹⁶ Mirsa and others, p. 95.

ini berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritual. Usaha luar biasa mereka juga membuahkan hasil dalam bentuk kelahiran banyak ulama berpengaruh, yang kemudian memainkan peran kunci dalam penyebaran ajaran Islam serta pengembangan peradaban di Aceh, Nusantara, dan bahkan hingga ke Asia. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran Islam yang tidak hanya menginspirasi masyarakat lokal tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam skala yang lebih luas di wilayah tersebut.¹⁷

Kerajaan Samudera Pasai merupakan salah satu fondasi utama dalam memperluas ajaran agama Islam di Nusantara. Pada abad ke-13, Islam mulai merasuk ke wilayah ini dan menjadi agama yang dominan di kerajaan ini. Sebagai sebuah Kerajaan Islam, Samudera Pasai memiliki peran sentral dalam memperkembangkan serta menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa. Kerajaan ini secara aktif mengirimkan ulama dan muballigh ke Pulau Jawa untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Sebaliknya, banyak ulama dari Jawa juga menimba ilmu agama di Samudera Pasai. Pongsibanne mengungkapkan bahwa hubungan erat antara Samudera Pasai dan perkembangan Islam di Jawa tercermin dalam kisah Wali Songo. Salah satunya, Sunan Kalijaga, yang merupakan menantu dari Maulana Ishak, Sultan Pasai. Sunan Gunung Jati, yang membawa Islam ke Cirebon dan Banten, juga diyakini berasal dari Pasai. Bahkan, beberapa bangsawan Aceh pindah ke Majapahit, yang kemudian menjadi pelopor Islam pertama di Jawa. Contohnya, Pangeran Makhudum, adik Putri Champa, yang dikenal sebagai Sunan Ampel, mendirikan pesantren di Desa Ampel Gading, Surabaya, setelah mendapat izin dari kakak iparnya, Raja Majapahit.¹⁸

Buku hukum Keraton Yogyakarta, Serat Tajussalatin, menunjukkan hubungan antara Samudera Pasai dan Jawa. Kitab tersebut merupakan salinan dari tulisan Jawi berbahasa Pasai, dari masa pemerintahan Sultan Alaud-Din Ri'ayat Syah. Syekh Yusuf, seorang ulama sufi yang menyebarkan Islam di Afrika Selatan, juga menimba ilmu di Pasai. Data ini menegaskan adanya jaringan intelektual yang erat antara Aceh, Jawa, dan seluruh Nusantara pada masa itu. Dengan demikian, masa pemerintahan Malikussaleh di Samudera Pasai memberikan kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran Islam di Indonesia.¹⁹

Pusat Perdagangan Nasional dan Internasional

Selama masa kemajuan Kerajaan Samudera Pasai, kunjungan Ibnu Battutah pada tahun 1345 memberikan gambaran yang menarik. Ia mencatat bahwa Samudera Pasai adalah sebuah pelabuhan yang vital, dengan istananya yang dibangun dan diatur menurut gaya arsitektur India, dan posisi pentingnya dipegang oleh seorang patih yang bergelar Amir. Ibnu Battutah, seorang petualang Muslim dari Maroko, terkesan oleh keindahan dan kemajuan kerajaan ini selama ia singgah selama 15 hari pada tahun tersebut. Ibnu

¹⁷ Fitriani, Siregar, and Ramli, p. 18.

¹⁸ Lebba Kadorre Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal (Kajian Antropologi Agama)*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara), 2017.

¹⁹ Sulistiono, p. 3.

Battutah memuji Samudera Pasai sebagai negeri yang subur dengan sebuah kota pelabuhan yang luas dan memukau.²⁰

Keberadaan fasilitas pelabuhan yang strategis dan aman tersebut, secara gemilang mengantarkan Kerajaan Samudera Pasai memperoleh reputasi sebagai pusat perdagangan yang vital di kawasan Asia pada masa keemasannya. Terletak di pesisir utara Sumatera, keberadaannya di dekat Selat Malaka, jalur perdagangan utama, memberinya keunggulan strategis dalam perdagangan internasional. Sebagai pelaku utama dalam perdagangan, Samudera Pasai terkenal sebagai produsen dan pengekspor rempah-rempah, terutama lada. Rempah-rempah ini menjadi komoditas utama yang diperdagangkan dengan pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Selain rempah-rempah, produk lain seperti sutra, kayu cendana, dan barang-barang kerajinan lokal juga diperdagangkan di sana.

Sistem mata uang emas yang diterapkan oleh Samudera Pasai juga memperkuat posisinya dalam perdagangan. Mata uang ini, dikenal sebagai *deureubam* yang terbuat dari emas atau dikenal juga dengan dirham, digunakan secara resmi dalam transaksi perdagangan, memudahkan pertukaran barang dan memperkuat ekonomi kerajaan. Selain uang dirham yang terbuat dari emas, kerajaan juga membuat mata uang lainnya yang berbahan baku perak dan timah.²¹ Samudera Pasai juga mampu memanfaatkan jalur perdagangan dan lalu lintas ekonomi dunia untuk menyebarkan dan mengenalkan budaya mereka dan ajaran Islam. Melalui jalur perdagangan, ideologi Islam tersebar ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Interaksi antara pedagang Muslim dan komunitas lokal di Samudera Pasai juga memperkaya budaya dan memperkuat penyebaran agama Islam di kawasan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Asia tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kerajaan itu sendiri, tetapi juga memperkuat hubungan antarbudaya dan memperkaya warisan budaya dan agama di wilayah tersebut.

Masa Akhir dan Keruntuhan

Dalam masa yang cukup lama dan gemilang, Samudera Pasai tetap mempertahankan peran pentingnya sebagai jalur perdagangan dunia internasional. Para sejarawan ekonomi mencatat bahwa Pasai bahkan pernah menjadi sentral perdagangan internasional di wilayah Nusantara setelah peran Kedah mulai menurun. Namun, kejayaan Pasai terkikis dengan munculnya Malaka di Semenanjung Melayu sebagai pusat perdagangan yang menggantikan posisi Pasai. Malaka segera menjadi magnet perdagangan, menarik perhatian dan menggeser posisi Pasai. Dalam waktu singkat, Malaka menjadi tujuan perantau dari Jawa, dan keberadaan Pasai semakin terpinggirkan.²² Perdagangan Pasai merosot, bahkan hampir terhenti sepenuhnya setelah

²⁰ Sulistiono, p. 3.

²¹ Ahmad Shihabuddin and Ellya Roza, 'Sejarah Uang Dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi Terhadap Peradaban Islam di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 171–86.

²² Muhammad Gade Ismail, *Pasai dalam Perjalanan Sejarah: Abad Ke-13 Sampai Awal Abad Ke-16* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997), p. 24.

Malaka berdiri pada tahun 1450. Kondisi semakin memburuk dengan kedatangan Portugis yang berambisi menguasai perdagangan di wilayah tersebut, bahkan mereka berhasil menduduki Kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1521.

Sekelompok serangan dan upaya ekspansi yang dilancarkan oleh Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada tidak hanya menimbulkan kerentanan terhadap pertahanan dan stabilitas Kerajaan Samudera Pasai, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Meskipun Kerajaan Samudera Pasai masih mampu mempertahankan diri, serangkaian konflik tersebut secara bertahap menghambat pertumbuhan dan pengaruh politik mereka. Keberhasilan Majapahit dalam memperluas wilayah ke arah Selat Malaka juga mengancam posisi Samudera Pasai sebagai pusat perdagangan dan kekuasaan di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa serangan dan ekspansi Majapahit tidak hanya memengaruhi secara langsung kekuatan militer Samudera Pasai, tetapi juga mengubah dinamika politik dan ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan.

Selain menghadapi tekanan dari Majapahit, Kerajaan Samudera Pasai semakin lemah ketika Kerajaan Aceh Darussalam muncul di wilayah Aceh. Proses reorganisasi politik setelah keruntuhan beberapa kerajaan pra-Islam di Aceh, seperti Kerajaan Indra Purba, Indra Purwa, Indra Patra, dan Indrapura, menghasilkan Kerajaan Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Pada tahun 1524, Kerajaan Samudera Pasai runtuh karena serbuan Kerajaan Aceh Darussalam. Serbuan ini menandai akhir kekuasaan Samudera Pasai dan awal dominasi Aceh Darussalam atas wilayah tersebut. Oleh karena itu, Kerajaan Aceh Darussalam akhirnya memiliki kendali penuh atas Kerajaan Samudera Pasai, yang menandai pergeseran besar dalam posisi politik dan kekuasaan di wilayah tersebut.²³

Keunikan Sistem Politik dan Pemerintahan

1. Kerajaan dengan Legitimasi Ilahi

Menurut Said, ketika Malikussaleh naik takhta sebagai Sultan perdana untuk Kerajaan Samudera Pasai, dia diangkat sesuai dengan tradisi Arab. Dia mengenakan pakaian kerajaan yang dikirim dari Mekkah saat prosesi penobatan. Ini menunjukkan bahwa upacara penobatan dilakukan sesuai dengan standar Arab, bukan seperti yang dilakukan di India pada saat itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Malikussaleh mungkin telah menjadi Muslim ketika dia dilantik menjadi Sultan Kerajaan Samudera. Setelah sultan baru diangkat, para pejabat dan rakyat dengan cepat memanggilnya "*Daulat Dirgahayu Syah Alam Zilluilahi Filalam*". Penggunaan gelar kehormatan ini menunjukkan kekuatan budaya Arab dalam struktur kekuasaan dan upacara kerajaan.²⁴

²³ Sufi, Rusdi, and Wibowo, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*, 50.

²⁴ Mohammad Said, 'Mentjari Kepastian Tentang Daerah Mula Dan Cara Masuknya Agama Islam Ke Indonesia', in *Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia* (Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963), p. 85.

Narasi pengangkatan sultan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Sultan Malikussaleh menonjol dengan keyakinan akan otoritas atau legitimasi ilahi yang dimilikinya. Pada saat pengangkatannya sebagai sultan, Malikussaleh diberikan gelar yang menggambarkan kedalaman keyakinan akan keterhubungannya dengan kekuatan ilahi. Gelar *Zilluilahi fil 'Alam* atau *Zilullah fil Ardh* yang diberikan padanya, yang berarti 'bayangan Allah di muka bumi', mencerminkan keyakinan bahwa sultan bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga representasi dari Tuhan di dunia ini.

Penggunaan gelar tersebut bukan hanya sekadar simbolisme kosong, tetapi mencerminkan filosofi dasar dari pemerintahan Samudera Pasai. Sultan dianggap sebagai wakil Tuhan yang bertugas menjaga kesejahteraan dan ketertiban umatnya, serta memastikan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Gelar ini menegaskan bahwa otoritas sultan berasal dari kehendak Tuhan, dan bahwa tindakan dan keputusannya dianggap sebagai manifestasi dari kebijaksanaan ilahi. Dengan gelar ini, Sultan Malikussaleh tidak hanya memiliki kekuasaan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Ia diharapkan untuk memimpin dengan keadilan, belas kasihan, dan kebijaksanaan yang sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan demikian, pemerintahan Samudera Pasai bukan hanya tentang ekspansi politik atau ekonomi, tetapi juga tentang penyelenggaraan keadilan sosial dan moralitas yang diperintahkan oleh agama Islam.

Di mata rakyat, prosesi pewarisan tahta menjadi sebuah peristiwa yang menggetarkan. Rakyat berkumpul di istana, menyaksikan seremoni yang penuh makna, di mana tongkat kekuasaan diserahkan dari tangan yang lama ke tangan yang baru. Di sinilah terjalinlah ikatan yang kuat antara sultan, kerajaan, dan rakyatnya. Ajaran Islam mengemukakan kedudukan khalifah kaum Muslimin diibaratkan sebagai seorang pengembara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keadilan umatnya. Ketika ada yang menderita, kelaparan, terjadi konflik, atau ketidakadilan di antara umat, semua itu menjadi tanggung jawab khalifah untuk diselesaikan.²⁵ Pandangan ini memberikan landasan yang kuat bagi pemerintahan Samudera Pasai, dan membantu menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Meskipun sultan adalah pemimpin tertinggi, keputusannya dianggap berasal dari kebijaksanaan ilahi, sehingga mendapatkan dukungan yang luas dari rakyat dan membuat kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan yang kuat di wilayah tersebut.

Menurut catatan Pemerintah Aceh, sultan Kerajaan Samudera dibantu oleh struktur kabinet dan pejabat pemerintahan yang terorganisir, selain berfungsi sebagai pilar utama dalam kepemimpinan kerajaan dan warganya. Dalam struktur pemerintahan Samudera Pasai, ada beberapa jabatan yang sangat penting. Sultan dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh satu orang Perdana Menteri yang memiliki tugas utama untuk menjadi wakil utama Sultan dalam memimpin aktifitas formal kerajaan. Sektor keuangan kerajaan ditanggungjawab oleh seorang Bendahara kerajaan. Seorang Sekretaris Kerajaan juga ditempatkan untuk mengurus seluruh kegiatan administratif dan

²⁵ Adhayanto Oksep, 'Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam', *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2011), 80–98 (p. 88).

persuratan. Pertahanan kerajaan diemban oleh komandan militer atau disebut juga Laksmana yang memiliki kepiawaian dalam peperangan laut. Seorang Qadi atau Hakim menjadi tulang punggung jaminan keadilan dan penegakan hukum. Di samping jabatan formal tersebut, ada juga yang dikenal dengan syahbandar. Syahbandar memiliki jumlah yang cukup besar, mereka memiliki tugas diplomatis, memperkuat hubungan dengan kerajaan dan negara-negara lain baik dalam bidang ekonomi dan politik, dan kerjasama.²⁶

2. Kepiawaian Diplomatis

Kerajaan Samudera Pasai terkenal karena menjalin hubungan diplomatik yang harmonis dengan berbagai kerajaan dan pemerintahan di seluruh dunia pada zamannya. Bisnis perdagangan dengan Cina, Terengganu, dan Pattani berjalan lancar berkat administrasi yang terorganisir dengan baik. Selain itu, hubungan bilateral dengan Turki Utsmani, yang saat itu dipimpin oleh Khalifah, juga berlangsung dengan baik. Sultan, yang juga memegang jabatan sebagai Khalifah Usmaniyah, secara rutin memberikan fatwa atas permintaan dari Kerajaan Samudera Pasai. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Samudera Pasai dalam jaringan perdagangan dan diplomasi pada masa itu, serta keberhasilan mereka dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan berbagai kekuatan global.

Sebagai kekuatan yang berpengaruh, Pasai menjalin persahabatan dengan berbagai negara, termasuk Champa, India, Cina, Majapahit, dan Malaka. Sultan Malik as-Saleh, menurut catatan Marco Polo, sangat menghormati Kubilai Khan dari Mongolia, dan hubungan dengan Cina berjalan dengan lancar. Laksamana Muhammad Cheng Ho bahkan mengirimkan utusan berkali-kali ke Pasai, memperkuat hubungan antara kedua negara. Ekspedisi-ekspedisi yang dilakukan membawa ahli perkapalan, senjata, pertanian, dan agama, semakin mempererat hubungan antara Pasai dan Cina. Salah satu bukti dari kedekatan ini adalah lonceng *Cakra Donya* yang masih ada hingga saat ini, sebagai hadiah dari Kaisar kepada Sultan Malikud-Dhahir.²⁷

Kepiawaian diplomatik yang dimiliki oleh Kerajaan Samudera Pasai memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencapai kejayaan ekonomi dan pertahanan wilayah. Melalui hubungan diplomatik yang kuat dengan berbagai negara dan kerajaan di seluruh dunia, Samudera Pasai berhasil membuka peluang bisnis yang luas dan menjadi bagian penting dalam perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan dengan Cina, Terengganu, dan Pattani. Keteraturan birokrasi dan lancarnya arus bisnis membantu meningkatkan perekonomian kerajaan ini.

Kepiawaian diplomatik ini juga memungkinkan Samudera Pasai menjalin persahabatan yang erat dengan negara-negara tetangga dan penguasa lainnya, seperti Champa, India, Majapahit, dan Malaka. Hubungan baik ini membantu memperkuat posisi kerajaan dalam kancah politik regional dan internasional, serta memberikan dukungan tambahan dalam bidang ekonomi

²⁶ Pemerintah Aceh, 'Kerajaan Samudera Pasai', *Pemerintah Aceh*, 2018 <<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/kerajaan-samudera-pasai>>.

²⁷ Sulistiono, p. 4.

dan pertahanan. Dengan demikian, kepiawaian diplomatik Samudera Pasai bukan hanya menciptakan kesempatan perdagangan yang menguntungkan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayah, menjadikan kerajaan ini meraih kejayaan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan negara.

3. Sistem Hukum Islam

Pada masa keemasannya, Samudera Pasai membanggakan lembaga peradilan yang beroperasi mirip dengan Mahkamah Agung, dengan penegakan hukum Islam sebagai fokus utamanya.²⁸ Bahkan, di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Samudera Pasai, terdapat cendekiawan hukum Islam yang menganut Mazhab Syafi'i, termasuk Sultan Malikuzzahir sendiri. Kehadiran mereka memperkaya pengetahuan hukum Islam di kerajaan tersebut. Dampaknya, banyak pakar hukum Islam dari wilayah sekitar, termasuk Kerajaan Malaka di Malaysia, mengunjungi Samudera Pasai untuk mencari fatwa hukum Islam dan mendapatkan pandangan yang mendalam tentang interpretasi hukum yang dipraktikkan di sana. Hal ini mencerminkan reputasi Samudera Pasai sebagai pusat intelektual dan keagamaan yang diakui di wilayah tersebut, serta menunjukkan pentingnya peran mereka dalam memperkaya warisan ilmiah dan hukum Islam.²⁹

Penerapan hukum Islam dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam menjadi landasan utama bagi keselarasan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini memberikan kepastian hukum yang konsisten dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Keberhasilan sistem hukum ini juga tidak terlepas dari kemampuan kerajaan dalam mengumpulkan para hakim (*qadi*) dan ulama yang berkualitas dan terpercaya dalam memahami ajaran Islam. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Alqur'an, hadis, dan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga mampu memberikan putusan yang adil dan bijaksana sesuai dengan konteks masyarakat setempat.

Kehadiran para ahli hukum yang kompeten dalam sistem peradilan Islam tidak hanya memperkuat pelaksanaan hukum secara konsisten dan efektif dalam menangani berbagai sengketa dan masalah hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak warga dilindungi dengan baik dan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap status sosial atau kekayaan mereka. Dengan demikian, suasana hukum yang stabil tercipta, memberikan dasar yang kokoh bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan para ahli hukum ini memberikan keyakinan kepada masyarakat akan keadilan sistem hukum, sehingga menciptakan rasa aman dan kepercayaan yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan hukum Islam di Kerajaan Samudera Pasai tidak hanya membawa keadilan bagi warga, tetapi juga menjadi pondasi kuat yang menguatkan legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Ini mencerminkan

²⁸ Sulistiono, p. 4.

²⁹ Hendra Gunawan, 'Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 43–60.

komitmen kokoh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan hukum yang ditegakkan secara adil, Samudera Pasai menjadi panutan yang dihormati dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam di wilayah Nusantara. Konsistensi dalam penerapan hukum ini tidak hanya menegaskan otoritas pemerintah, tetapi juga menciptakan iklim sosial yang harmonis dan stabil, memperkuat persatuan di antara warga dan membuka jalan bagi kemajuan yang berkelanjutan di seluruh kerajaan..

4. Prinsip Musyawarah

Komunikasi antara Sultan dan rakyatnya berlangsung harmonis. Sultan sering mengadakan musyawarah dan dialog dengan para ulama, serta memperlihatkan penghargaan yang tinggi kepada para tamu yang berkunjung, sering kali memberikan hadiah sebagai tanda kasih.³⁰ Sultan, sebagai pemimpin utama, tidak hanya memegang peran sentral dalam mengatur kerajaan, tetapi juga menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap aspirasi dan usulan dari berbagai pihak di sekitarnya. Ini mencakup pejabat pemerintahan, kalangan ulama, dan rakyatnya sendiri. Pendekatan ini bukanlah tindakan semata, melainkan merupakan implementasi dari sistem pemerintahan yang berakar pada prinsip-prinsip syura, sebagaimana yang dianjurkan oleh ajaran Alquran.

Sultan memainkan peran sentral yang tidak hanya berfokus pada keputusan individu dalam dinamika pemerintahan, tetapi juga melibatkan interaksi yang erat dengan berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan semangat dialog dan keterlibatan aktif yang menjadi landasan bagi kebijakan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan bersama. Dengan melibatkan berbagai segmen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Sultan menciptakan fondasi yang kokoh untuk kebijakan yang lebih holistik dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Lebih dari sekadar menegaskan legitimasi pemerintahan, pendekatan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara mereka sendiri. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pemerintah dan warganya, tetapi juga mengilhami semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam merajut masa depan yang lebih baik.

Pendekatan ini adalah nyatakan dalam implementasi konsep syura, yang mementingkan prinsip konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip-prinsip ini, yang ditemukan dalam ajaran Alquran, menyediakan landasan filosofis yang mendukung pemerintahan yang responsif dan demokratis, bahkan dalam kerajaan sejarah seperti Samudera Pasai. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bukan hanya strategi politik semata, tetapi juga bagian tak terpisahkan dari sistem pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks Samudera Pasai, pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga menciptakan suasana yang inklusif dan memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Ini mencerminkan nilai-nilai yang mendasari keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan pondasi yang kokoh untuk kemajuan suatu negara.

³⁰ Sulistiono, p. 5.

Penutup

Melalui tinjauan sistem politik Kerajaan Samudera Pasai, terlihat bahwa dinamika politik dan warisan sejarahnya memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan Nusantara. Kerajaan ini, yang didirikan oleh Malikussaleh, tidak hanya menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut tetapi juga menjadi pusat perdagangan yang penting secara regional dan internasional. Sistem politiknya, yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, memungkinkan Sultan untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif dengan menggabungkan prinsip-prinsip syura dengan otoritas pemerintahan.

Warisan sejarah Kerajaan Samudera Pasai tetap menjadi bagian integral dari sejarah Nusantara. Pengaruh Islam, perdagangan, dan sistem politiknya memberikan kontribusi yang penting dalam membentuk identitas dan perkembangan wilayah tersebut. Kesimpulannya, melalui pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik dan warisan sejarah Kerajaan Samudera Pasai, kita dapat menghargai pentingnya peran mereka dalam pembentukan dan perkembangan Nusantara sebagai sebuah wilayah yang beragam dan bersejarah.

Referensi

- Aceh, Pemerintah, 'Kerajaan Samudera Pasai', *Pemerintah Aceh*, 2018 <<https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/kerajaan-samudera-pasai>>
- Ajis, Ambo Asse, 'Ramni—Ilamuridesam: Kerajaan Aceh Pra-Samudera Pasai', *Berkala Arkeologi SANGKHALAKALA*, 20.2 (2018), 79 <<https://doi.org/10.24832/bas.v20i2.280>>
- Arifin, , Abd Rahman Hamid, and Siti Masykuroh, 'Pasai Muslim Diaspora in the 16th Century on the North Coast of Java', *KnE Social Sciences*, 2024 (2024), 158–70 <<https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15847>>
- Fitriani, Andini, Isrina Siregar, and Supian Ramli, 'Peran Sultan Malikussaleh Dalam Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai 1297-1326M', *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2.1 (2022), 11–22 <<https://doi.org/10.22437/jejak.v2i1.18539>>
- Gunawan, Hendra, 'Potret Perjalanan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 43–60
- Hall, Kenneth R., 'Maritime Trade and Societal Transitions in the Western Indonesian Archipelago: Samudra-Pasai at the Dawn of the European Age (c. 1200-1500)', *Asian Review of World Histories*, 5.1 (2017), 31–69 <<https://doi.org/10.12773/arwh.2017.5.1.031>>
- Hamid, Abd. Rahman, 'Jalur Rempah Dan Islamisasi Nusantara', *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 23.3 (2022), 269–82 <<https://doi.org/10.14203/jmb.v23i3.1065>>
- Ismail, Muhammad Gade, *Pasai Dalam Perjalanan Sejarah: Abad Ke-13 Sampai Awal Abad Ke-16* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,

1997)

- Iswanto, J, 'Pertumbuhan Institusi Sosial Politik Samudera Pasai, Malaka, Banten Dan Mataram', *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2.1 (2021), 38–49
- Mirsa, Rinaldi, Muhammad Muhammad, Eri Saputra, and Izzati Farhana, 'Space Pattern of Samudera Pasai Sultanate', *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, 1.2 (2021), 94–103 <<https://doi.org/10.52088/ijesty.v1i2.120>>
- Muhammad, Taqiyuddin, 'Jejak Kebudayaan Persia Samudra Pasai', *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2017, 31–42
- Oksep, Adhayanto, 'Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam', *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2011), 80–98
- Pangestu, Yogi Aji, Debora Alfi Dwidu Teofani, and Rabith Jihan Amaruli, 'Uncovering Javanese Islamic Asceticism to Prevent Destructive Tourism Patterns in Gunung Kemukus', *E3S Web of Conferences*, 317 (2021) <<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701019>>
- Pongsibanne, Lebba Kadorre, *Islam Dan Budaya Lokal (Kajian Antropologi Agama)*, *Kaukaba Dipantara*, 2017
- Said, Mohammad, 'Mentjari Kepastian Tentang Daerah Mula Dan Cara Masuknya Agama Islam Ke Indonesia', in *Risalah Seminar Sedjarah Masuknya Islam Ke Indonesia* (Medan: Panitia Seminar Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963)
- Shihabuddin, Ahmad, and Ellya Roza, 'Sejarah Uang Dirham Kesultanan Samudera Pasai: Kontribusi Terhadap Peradaban Islam Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2023, 171–86
- Sufi, Agus Budi, Rusdi, and Wibowo, *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Aceh* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006)
- Sulistiono, Budi, *Menelusuri Tinggalan Arkeologi Kesultanan Samudera Pasai* (Jakarta: Lembaga Pentashihan & Mushaf Alqur'an, 2015)